

**KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG,
MALAYSIA. (ANALISIS PUTUSAN HAKIM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah
Pada Jurusan Syariah dan Hukum Fakultas Syariah
UIN Sumatera Utara

Oleh

MOHAMAD EFFENDI BIN AZMI

NIM: 21.13.5.069



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M /1438 H

**KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG,
MALAYSIA. (ANALISIS PUTUSAN HAKIM)**

SKRIPSI

Oleh

MOHAMAD EFFENDI BIN AZMI

NIM: 21.13.5.069



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M /1438 H

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG ,MALAYSIA** telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 6 November 2017, skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Jurusan Ahwal syakhsiyah .

Medan, 18 Desember 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skiripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati M. hum
NIP. 196802011993032005

Irwan, M.Ag
NIP. 197212152001121004

Anggota-anggota

Fauziah lubis, M. Hum
NIP. 197105282008012013

Zainal Ariffin Purba M. Ag
NIP. 196801182000031002

Dr. Nurcahaya, M. Ag
NIP. 197110271996032002

Drs. Hasbullah Ja'afar
NIP. 19600818199403001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sumatera Utara

Dr Zulham M.Hum
NIP.197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Effendi Bin Azmi

Nim : 21135069

Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia/ 31 Oktober.

Alamat : NO 34 Jl. Nanggarjati ,SidorameTimur,Medan

Judul Skripsi : Ketidakadilan Pelaku Poligami Sebagai Alasan
Penceraian Di Mahkamah Syariah Bentong,
Pahang ,Malaysia (Analisis Putusan Hakim)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Oktober 2017

Yang membuat pernyata

Mohamad Effendi Bin Azmi

NIM. 21135069

IKHTISAR

Ketidakadilan pelaku poligami salah satu macam dari permasalahan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan poligami .Poligami dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah perkahwinan lebih dari seseorang .Menurut enakmen subsyeksyen 23(4) adalah bagi memastikan isteri-isteri mendapat keadilan supaya hak mereka terpelihara dan dilindungi dengan adanya enakmen ini maka syarat poligami hendaklah mengikut peraturan tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti apa sebenarnya alasan yang kuat yang menjadi hakim memutuskan putusan kepada pelaku yang kasus ketidakadilan poligami ini lantas membuat satu tulisan yang berjudul: **KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG,PAHANG MALAYSIA.** Dalam skripsi ini yang menjadi **rumusan masalah** : Bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami sebagai alasan perceraian di Mahkamah Syariah Bentong ,Pahang. Bagaimana poligami di Mahkamah Syariah Bentong Pahang dan bagaimana upaya untuk menciptakan cara poligami yang adil dan harmonis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data , baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah **penulis meneliti dan menganalisa ,penulis ambil kesimpulan sebagai** berikut : Pemahaman pandangan hakim di Negeri Pahang terhadap ketidakadilan poligami ini adalah apabila pelaku telah melakukan ketidakadilan poligami yang ada alasan tertentu maka isteri diperbolehkan untuk fasakh kepada suami.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ingin ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Seiring dengan itu kira

shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah;“KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PENCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN HAKIM) DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG, PAHANG ,MALAYSIA”.

Dalam rangka usaha penyelesaian skripsi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari, berkat kerja keras dengan kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) ini bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi

pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpul dan menganalisanya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran dan kritik yang konstruktif sifatnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini agar lebih spesifik penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Azmi Bin Harun, ibunda Rozana Binti Mohamad Musa yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik materil maupun spiritual serta senantiasa mendoakan buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan akhirnya bisa meraih gelar sarjana.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada ibuk Fauziah Lubis, M.Hum selaku dosen pembimbing I, dan juga bapak Zainal ArifinPurba M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah skripsi. Ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini. Ucapan terima kasih juga buat teman-teman yaitu Hafidzullah,Sharo Nizaimi, Shahera , Fatihah, Sumayyah, Yulia, Shahrir, serta teman-teman yang lain. Moga Allah memberikan ganjaran buat kalian dengan sebaik-baik ganjaran kerna Dialah sebaik-baik pemberi ganjaran.

Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat dikaji dengan lebih mendalam dan menyeluruh agar memberikan banyak manfaat bagi para ilmuwan khususnya serta masyarakat pada umumnya. Semoga Allah berkenan menilai usaha ini sebagai amal usaha yang positif yang akan memberatkan timbangan di hari akhirat nanti. Allahumma aamin.

Wassalam.

Medan, 31 Oktober 2017

Penulis

MOHAMAD EFFENDI BIN AZMI

NIM: 21135069

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
i	
PENGESAHAN	
ii	
SURAT PERNYATAAN.....	
iii	
IKHTISAR	
vi	
KATA PENGANTAR.....	
v	
DAFTAR ISI	
IX	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kajian	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Poligami Dalam Islam.....	20

B. Hak dan Kewajiban Isteri Mahupun Suami.....	27
a. Hak dan Kewajiban Suami Kepada isteri.....	27
b. Hak dan Kewajipan Isteri Kepada Suami.....	30
c. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Poligami.....	34
BAB III MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG	37
A. Latar Belakang Makamah Syariah Bentong	37
B. Visi dan Misi ,Objektif Jabatan Syariah Bentong.....	42
C. Fungsi Pengadilan di Mahkamah Syariah Bentong....	45
D. Kompetensi Mahkamah Syariah Bentong.....	46
E. Carta Organisasi Mahkamah Syariah Bentong.....	51
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH	
TENTANG KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI.....	52
A. Putusan Hakim Kes Mal Nombor 04300-076-021.....	52
B. Analisis Putusan Penulis.....	56
C. Putusan Hakim Kes Mal Nombor 09700-013-6789....	62
D. Analisis Putusan Penulis.....	66
E. Upaya Menciptakan Poligami Dalam Keluarga Yang Harmonis.....	76

BAB V	PENUTUP	
81		
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saranan.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		
DOKUMENTASI		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atau menikahi lebih dari satu orang isteri bukan merupakan masalah baru, hal itu telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar negara didunia selama masa itu. Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbasinia dan Persia. Di Persia, prinsip poligami merupakan basis keluarga. Jumlah isteri yang dapat dimiliki seorang laki-laki bergantung pada kemampuan ekonominya. Nabi Muhammad SAW membolehkan poligami untuk masyarakatnya karena beliau telah mempraktikkan oleh orang-orang Yunani yang di antaranya bahkan seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjual belikan secara lazim diantara mereka. Hal serupa bisa dijumpai di Romawi pada masa Romawi Kuno, dimana kedudukan wanita mencapai titik terendahnya.¹

Bentuk poligami juga merupakan kebiasaan di antara suku-suku masyarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Poligami juga sudah menjadi kebiasaan kepada mereka walaupun berbeda bangsa dan agama. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligami, karena mereka

¹Akmal Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Cetakan kencana, 2004) h. 21

menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami).

Poligami dalam Islam baik dalam hukum maupun praktiknya, diterapkan secara bervariasi di tiap-tiap negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang memperketat aturan poligami untuk pegawai negeri, dan sedang dalam wacana untuk diberlakukan kepada negeri publik ini secara umum agar mendidik masyarakat supaya keseriusan poligami itu memang dilaksanakan kerna adanya hukum.

Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an Surah An nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu menikahi dengan mereka), maka nikahilah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (nikahlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:²

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabukk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

² A.Rodli Makmun. *Poligami Dalam Tafsir*, (Ponorogo: Terbitan dari STAIN Ponorogo Press, 2009) hal 16.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan diatas merupakan hal hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim apakah layak putusan cerai tersebut dijatuhkan atau tidak. Alasan tersebut berikutnya akan diperiksa apakah benar ada alat bukti yang mendukung baik itu adalah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam konteks perundangan Islam di Malaysia, permasalahan yang berhubungan dengan poligami telah mendunia dan dan terdapat di Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam disetiap negara. Dalam undang-undang itu telah dijelaskan berdasarkan hukum Syarak dengan mengambil prinsip *siyasaḥ syar'iyah* bagi memastikan konsep keadilan terus terpelihara.³

Sekalipun Islam membenarkan untuk melakukan berpoligami, namun setiap lelaki Islam yang ingin berpoligami di Malaysia adalah tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam Akta atau Enakmen Undang-Undang

³ Abu Izzat, *Fiqh Keluarga Islam*, (Kuala lumpur: cetakan Al-Hidayah, 2004) h. 24.

Keluarga Islam di Negeri masing-masing sebelum mereka dibenarkan untuk berpoligami oleh Mahkamah Syariah.

Bagi Wilayah Persekutuan, di bawah subseksyen 23(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (*Akta 303*) memperuntukkan bahawa setiap pernikahan poligami hendaklah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Subseksyen 23(1) memperuntukkan seperti yang berikut: ⁴

Tidak seorang pun lelaki apabila masih terikat dalam perkawinan dibolehkan untuk menikah, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis dari pada Mahkamah, membuat akad nikah pernikahan yang lain dengan perempuan lain.

Jika pada pandangan mahkamah seseorang lelaki itu tidak layak atau tidak mampu untuk berpoligami, maka permohonan itu akan ditolak walaupun isteri atau isteri-isteri sedia ada memberikan keizinan.

Permohonan poligami juga diperketatkan lagi dengan adanya peruntukan subseksyen 23(4) Akta 303. Syarat-syarat yang dinyatakan di bawah subseksyen 23(4) adalah bagi memastikan isteri-isteri mendapat keadilan supaya hak mereka terpelihara dan dilindungi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, pertama, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan; kedua, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.

⁴ Doi Abdurrahman, *Poligami dalam syariah* (Malaysia: Terbitan Telaga Biru, 1992) h. 21

Alasan-alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberi izin atau tidak, ada tiga pihak (1) pihak isteri, (2) pihak suami, dan (3) pihak orang-orang yang terkait. Adapun yang bersumber dari pihak isteri adalah karena kemandulan; keudzuran jasmani, karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual, sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau isteri gila.

Sedang pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami, adalah:⁵

1. Suami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua biaya isteri-isteri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya kelak dengan perkahwinan tersebut.
2. Suami berusaha berbuat adil di antara para isterinya.

Adapun pertimbangan dari pihak orang-orang terkait, yang lebih tepat disebut orang-orang yang terkena akibat dari poligami, adalah (i) bahwa pernikahan tersebut tidak menjadikan isteri-isteri yang sudah dinikahi menjadi dimudaratkan, (ii) poligami tersebut tidak merendahkan langsung terhadap tarap hidup (martabat) orang-orang yang sebelumnya menjadi tanggungannya.

Sedang prosedur untuk berpoligami ada tiga langkah:

1. Suami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari hakim, bersama persetujuan atau izin dari pihak isteri/isteri-isterinya.

⁵ Daura, Bella. *"The Limits of Poligami in Islam"* dalam *Journal of Islamic and Comparatif Law*, (Jakarta:Terbitan Jakarta, 1969). H. 34

2. Pemanggilan pemohon dan isteri atau isteri-isteri, sekaligus pemeriksaan oleh pengadilan terhadap kebenaran pemohon.
3. Putusan pengadilan berupa penerimaan atau penolakan terhadap permohonan pemohon.

Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenakan hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya.

Putusan hakim juga ada menggariskan dan menetapkan ,undang –undang kekeluargaan Islam juga memberi hak kepada seorang isteri untuk menuntut fasakh perkahwinanya sekiranya terbukti suami tidak memberi keadilan kepada isteri-isterinya. Bukan hanya seperti itu saja, ketidakadilan antara isteri-isteri adalah suatu kesalahan dibawah undang-undang keluarga Islam.Telah terjadi di Mahkamah Wilayah Persekutuan akan kes ini,jadi putusan Hakim menetapkan si suami harus melafaz taalik. Sesuai di dalam Memorandum Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam 1996 tentang poligami bagi menuntut keadilan dari pihak isteri-isterinya.⁶

Jadi akibat ketidakadilan poligami ini menyebabkan berlaku alasan penceraian ianya juga berlaku daripada tidak mematuhi dari rukun. Apabila berpoligami hendaklah pelaku poligami itu mematuhi rukun kerana adanya rukun itu sebagai panduan untuk memelihara poligami agar mewujudkan suasana adil.

⁶ Mahmood Zuhdi,*Undang-Undang Keluarga Islam* (Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah, 1986) h.45

Sebagaimana telah disampaikan di atas, rukun dan syarat pernikahan yang disyariatkan dan ditetapkan dalam Islam pada pernikahan pertama juga menjadi rukun dan syarat yang disyariatkan dalam pernikahan poligami. Sebab, keduanya sama-sama pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi, ketika seseorang berpoligami, dia wajib memenuhi rukun dan syarat tersebut, ditambah beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah Subhanahu wata'ala sebut dalam Al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

1. Jumlah isteri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat, tidak boleh lebih.
2. Dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para isteri.
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Syarat yang pertama: Allah Subhanahu wata'ala membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan.⁷

Setelah kita memahami kaidah tersebut, maka kita bisa menerapkan kaidah tersebut pada syariat poligami yang telah Allah perbolehkan. Tentu di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar walaupun ada beberapa mudarat yang ditimbulkan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan syariat tersebut. Sebagai contoh misalnya: terkadang terjadi kasus saling cemburu di antara para isteri karena beberapa permasalahan, maka hal ini adalah mudarat yang ditimbulkan dari praktek poligami.

⁷ Abu Abdil Muhsin Firanda, *Mukjizat Poligami*, (Indonesia: Terbitan Nashirus Sunnah, 2009). h. 25

Demikian juga dengan poligami ini, terkadang juga banyak di antara penolak syariat poligami yang menutup mata atau berpura-pura tidak tahu bahwa banyak praktek poligami yang dilakukan dan berhasil. Dari mulai Rasulullahshallallahu alaihi wa sallam, para sahabat, para ulama di zaman dahulu dan sekarang, bahkan banyak kaum muslimin yang sudah menjalankannya di Negara muslim dan telah berhasil seterusnya menciptakan keturunan yang baik dan sihat.

Praktek Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam itu sendiri, dimana beliau menikahi sembilan wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (sembilan isteri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari empat isteri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, itu dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.⁸

Disebabkan ada pasangan yang berpoligami tidak mengikuti rukun dan persyaratan maka itu juga merupakan alasan berlakunya perceraian. Jadi kita akan melihat negara yang berbeda dalam pengaturan syarat poligami. berbagai alasan yang dikemukakan untuk berpoligami seperti di Malaysia dan Indonesia sangat

⁸ Achmad Sunarto,*Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah*,(Surabaya:Terbitan Ampel Surabaya, 2014).h.23

berbeda. Juga tertumpu kepada individu yang mencorak di dalam alam pernikahan tetapi jika ada yang ingin berpoligami lantas terjadinya ketidakadilan dalam poligami sebagai alasan untuk perceraian. Jika kita lihat perbedaan dua negara ini sangat berbeda dari segi pengaturan sistem pernikahan. Jika di Malaysia terjadinya ketidakadilan poligami kerana si suami sangat gagal dalam pengaturan poligami sedangkan di Indonesia sangat melihat keadaan ekonomi semasa. Namun, manfaat yang didapatkan dengan berpoligami untuk kaum muslimin berupa bertambahnya banyaknya jumlah kaum muslimin dan terjaganya kehormatan wanita-wanita muslimah baik yang belum menikah maupun para janda merupakan kebaikan dan maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin.

Padahal jika pahami bersama tujuan poligami adalah untuk membentuk kekuatan Islam seperti ketika zaman Rasulullah berpoligami atas sebab menyelamatkan agama dan membantu kaum muslimat, juga untuk membangun pasangan yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera serta diliputi oleh keadaan poligami yang adil dalam berkasih sayang.⁹

Kasus seperti ketidakadilan dalam pelaku poligami sebagai alasan perceraian sudah ada di Malaysia seperti di negeri Pahang dan boleh dijadikan tempat untuk meneliti kasus ini lebih rinci dan lebih mendalam untuk digunakan sebagai sumber yang boleh kita jadikan sebagai rujukan sumber untuk menjawab persoalan dalam lingkungan ketidakadilan dalam poligami ini seterusnya boleh dijadikan sumber pada pengetahuan kita dan pada masyarakat agar semuanya

⁹ Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah*, (Surabaya: Terbitan Ampel Surabaya, 2014). h.24

boleh mengetahui akan hal permasalahan yang melanda ini dan boleh di ambil pengajaran dan nilai bahawa poligami itu tidak semudah yang kita sedia sangka.

Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam serta terperinci dan menulisnya dalam bentuk skripsi berjudul **“KETIDAKADILAN DALAM PELAKU POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG”**(ANALISIS PUTUSAN HAKIM).

B.Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,maka penulis membuat rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami sebagai alasan perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang?
2. Bagaimana poligami di Mahkamah Syariah Bentong ,Pahang?
3. Bagaimana upaya untuk menciptakan cara poligami yang adil dan harmonis?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan poligami sebagai alasan perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang,Malaysia.

2. Untuk mengetahui apa penerapan/implikasi yang timbul dari ketidakadilan berpoligami dalam keharmonisan rumah tangga mereka di Mahkamah Syariah Bentong ,Pahang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk menciptakan cara berpoligami yang adil dan melahirkan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademik keilmuan dalam hukum keluarga islam iaitu pola pikir berpoligami.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum keluarga islam.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syariah dan hukum jurusan al-ahwal al syakhshiyah fakultas syariah dan hukum di UIN-SU

E. Metode Penelitian.

Metode adalah rumusan cara-cara yang tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam Bahasa ilmiah ,untuk itu agar pembahasan menjadi terarah sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah .untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dalam kaedah mengkaji buku di perpustakaan untuk

mendapatkan maklumat dan informasi perbahasan yang jelas dan konkrit dengan menggunakan pencarian sumber di perpustakaan.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:

a. Data Sekunder.

Data yang diperoleh daripada tempat penelitian iaitu data pokok seperti putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Syariah Bentong ,Pahang.

b. Data Primer.

Jenis data Primer adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku.

3. Pengumpulan Data

Library research,yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.sepertibuku analisis poligami menurut perspektif islam, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia.*

4. Metode Analisi Data .

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data ,maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini.data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum islam .hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada . analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus dan analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan. Berikut merupakan sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan ,penulis akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri daripada di dalam bab 1 yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah ,tujuan penelitian,kegunaan peneltian,metode perbahasan dan sistematika perbahasan.

BAB II : Dalam bab teori perbahasan ini penulis akan menuliskan mengenai konsep poligami menurut islam hak dan kewajiban suami isteri dan bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami.

BAB III : Gambaran umum penelitian di tempat penelitian seperti latar belakang tempat penelitian,visi dan misi tempat penelitian dan fungsinya.

BAB IV : Gambaran umum penelitian yaitu ketidakadilan dalam poligami sebagai alasan penceraian di dalam rumah tangga dan hasil penelitian yang membahas tentang ketidakadilan poligami sebagai alasan penceraian di Malaysia beserta analisis penulis.

BAB V : Penutup bab ini merupakan jawapan dari rumusan masalah yang terdahulu dan disamping itu penulis mengemukakan beberapa untuk saran-saran dan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami Dalam Islam.

Poligami dari sudut bahasa adalah menghimpun berbilang isteri dalam satu masa mengikut dalam kamus bahasa ,poligami bererti amalan beristeri lebih daripada seorang pada masa yang sama, sedangkan kata poligami yaitu pernikahan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki yang menikah dengan banyak perempuan kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandry*.¹⁰

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehinggalah poligami dipakai untuk makna laki-laki beristeri banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai. Poligami berarti ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) menikahi beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti pernikahan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.

Poligami adalah suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai isteri lebih dari seorang wanita manakala yang asli didalam pernikahan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

¹⁰ Amany lubis, *Kamus Modern Indonesia*, (Jakarta: Terbitan UIN Jakarta, 2013). hal 534.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dinikahi dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah umat Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan yang berada dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti nikah atau pernikahan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah pernikahan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹¹

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti pernikahan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja

¹¹ Abrak Othman, *Kamus Komprehensif Bahasa Melayu*, (Malaysia: Terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd, 2003).h.24.

mengikuti kemampuan yang boleh dilakukan oleh laki-laki sama ada adil dalam nafkah zahir dan batin kepada semua isterinya bagi memastikan hak isteri terbelas dan memartabatkan seseorang wanita yang bergelar isteri kepada suaminya yang melakukan poligami.

Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami yaitu terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahi), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

¹² A.Rodli Makmun .*Poligami Dalam Tafsir*,(Ponorogo:Terbitan dari STAIN Ponorogo Press, 2009).hal 16.

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami ayat *Akhkam* itu sebagai berikut:

1. Perintah Allah SWT, *“maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”*, difahami sebagai perintah ibadah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (isteri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting isteri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah *“maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”*. Menurut Alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, *“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”* seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang isteri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.¹³
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu*

¹³ Dari buku terjemahan ,*Tafsir Ibnu Qayim*,(Damaskus:Terbitan Darul Falah, 2008) h.56

sangat ingin berbuat demikian”. Adil dalam cinta diantara isteri-isteri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia, karena sifat manusia itu memang terbatas.

5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafie mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafie terhadap teks Al`Qur`an, *“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab *“akhhkam al-qur`an”*, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafie jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.

Demikian dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul isteri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.¹⁴

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW dalam berpoligami mengikut keperluan yang

¹⁴ Karam Hilmi Farat,*Poligami Pandangan Islam*,(Jakarta:Terbitan Darul Haq, 2011).Hal.24.

ditetapkan oleh para nabi ketika itu. Secara tidak langsung poligami ini memang telah diamalkan oleh nabi terdahulu. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diberikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri di Dalam Pernikahan.

a. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri.

1. Melindungi isteri dengan baik, memimpin dan membimbing isteri dengan penuh kesabaran.¹⁵

Persoalan pernikahan seperti hubungan suami isteri, mendidik anak, ekonomi keluarga, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya tentu akan hadir dalam kehidupan mereka yang telah berkeluarga. Maka ia juga tidak salah jika dalam pernikahan dibutuhkan ilmu syarie, baik pihak isteri, terlebih lagi suami sebagai pemimpin bagi dalam keluarga karena dengan ilmu yang disertai amalan yang baik, maka kesannya terjadinya akan tegak segala urusan dan akan lurus jalan kehidupan di dalam rumah tangga.

2. Memberi nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.

Di antara hak terbesar wanita yang menjadi kewajiban suaminya adalah nafkah. Nafkah, secara bahasa adalah, harta atau semacamnya yang telah diinfaqkan (dibelanjakan) oleh seseorang. Adapun secara istilah, nafkah adalah, apa yang

¹⁵ Juhaya S. Pradja, *Pernikahan Keluarga Muslim*, (Bandung: pustaka Setia, 2005) h. 21.

diwajibkan atas suami untuk isterinya dan anak-anaknya, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya.

3. Ikut membantu meringankan beban isteri dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari terutama dalam hal mendidik anak.

Beberapa hal yang dapat dilakukan suami untuk membantu meringankan beban isteri. Akhlak yang baik dari suami itu bisa menjadi penuntun agar isteri makin cinta, makin hormat dan makin menghargai hubungan mereka sehingga keluarga yang baik dan bahagia pun dapat tercapai. Dan semoga kita juga semua bisa menjadikan akhlak yang baik sebagai panutan yang kita praktekan dalam segala aspek dalam kehidupan ini. Saling membantu antara satu sama lain agar dapat meringankan beban isteri yang tercinta dan hendaklah seorang suami itu mendidik anak supaya melahirkan anak yang baik dan nilai murni.¹⁶

4. Jangan menyakiti isteri, baik jasmani maupun rohani.

Sebagai seorang suami hendaklah jangan menyakiti hati isteri kerana perkara itu tidak baik dilakukan seorang suami. Jika para suami ingin rezekinya selalu lancar dan berkah maka jangan pernah coba-coba sekalipun untuk menyakiti hati isteri. Cobalah untuk bersikap lemah lembut terutama kepada isteri, cukupi segala kebutuhannya maka dengan begitu yakinlah bahwa nanti rezeki akan menjadi terbuka lebar begitu juga jasmani maupun rohani si isteri.

¹⁶ Juhaya S. Pradja, *Pernikahan Keluarga Muslim*, (Bandung: pustaka Setia, 2005) h. 21.

5. Menghormati dan menghargai keluarga isteri.

Seorang suami hendaklah perlu menghormati dan menghargai keluarga isteri. Seorang suami tidak boleh membenci isterinya, karena jika ia tidak karena jika ia tidak menyukai salah satu karakteristiknya, ia boleh jadi menyukai sifatnya yang lain. Secara baiknya, diharamkan dalam Islam untuk merubah karakteristik-karakteristik sang istri yang tidak disukai suaminya, sepanjang karakteristik-karakteristik itu tidak seiring dengan Islam. Seorang isteri juga haruslah memiliki personalitasnya sendiri yang berbeda dari suaminya, dan ia tidak berhak untuk menghancurkan kepribadian suaminya dan mencoba menyesuaikannya dengan kepribadiannya. Suami harus menyadari bahwa mungkin ada elemen-elemen tertentu dari karakter isterinya yang tidak menyenangkannya, sebagaimana halnya mungkin ada aspek-aspek tertentu dari karakteristiknya yang tidak disukai olehnya, begitu juga dengan keluarga di sebelah isteri seorang suami harus menghormati seperti keluarganya sendiri.¹⁷

6. Sabar dalam menghadapi kekurangan isteri.

Seorang suami hendaklah mempunyai sikap seorang yang sabar apabila menghadapi kekurangan isteri. Apabila berlaku seperti ini hendaklah sabar dalam membantu dan bersama dalam menyelesaikan kekurangan isteri seperti membantu isteri. Barulah rumah tangga saling memahami dan melengkapi antara satu sama lain.

b. Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami.

1. Isteri wajib taat kepada suami.

¹⁷ .Juhaya S.Pradja ,*Pernikahan Keluarga Muslim*,(Bandung:pustaka Setia,2005) h. 22.

Isteri yang taat adalah isteri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Isteri harus selalu menaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergocang begitu hebat.¹⁸

Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada isteri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggungjawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui isteri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu.

2. Tidak keluar rumah dengan izinnya.

Islam adalah agama yang penuh rahmat, agama yang secara terperinci amat memperhatikan kebutuhan pemeluknya, dari urusan yang kecil sampai yang besar, dari masalah pribadi sampai masalah yang berkaitan dengan orang lain. Itu semua tentu untuk kebaikan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti.

Diharamkan bagi setiap isteri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Selain izin suami, ada syarat lainnya lagi bagi seorang wanita muslimah. Inilah ketentuan dari ajaran agama kita, yang memang tidak lagi

¹⁸ Jamaluddin . *Hukum Pernikahan 4 Mazhab*, (UIN SU: Terbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,2002)h.25

diperhatikan oleh kebanyakan wanita zaman sekarang. Jadi seorang isteri yang baik apabila hendak keluar ke rumah harus meminta izin suaminya.

3. Jangan menyakiti suami, baik jasmani maupun rohani.

Sebagai seorang isteri hendaklah jangan menyakiti hati suami kerana perkara itu tidak baik dilakukan seorang isteri. Jika ingin rezekinya selalu lancar dan berkah maka jangan sesekali pernah coba-coba sekalipun untuk menyakiti hati suami. Cobalah untuk bersikap lemah lembut kepada suami, cukupi segala kebutuhannya maka dengan begitu yakinlah bahwa nanti rezeki akan menjadi terbuka lebar begitu juga jasmani maupun rohani si suami.

4. Menggauli suami dengan baik.

Sebagai seorang isteri yang baik hendaklah melayani suami dengan baik. Apabila si suami mengajak isteri untuk senggama, maka si isteri harus menunaikan hasrat si suami. Isteri yang baik akan menunaikan permintaan suami, ini kerana memang kewajiban seorang isteri melayani suami di ranjang. Suami dan isteri haruslah berkomunikasi dengan baik saat senggama. Bercinta adalah salah satu aktifitas suami isteri yang harus dilaksanakan bagi pasangan suami isteri kerana bersetubuh adalah sebahagian dari ibadah tentu saja caranya sudah di atur oleh syariat agama dan tentu saja harus dipatuhi dengan baik.

5. Menghormati keluarga belah suami.

Seorang isteri hendaklah perlu menghormati dan menghargai keluarga suami. Seorang isteri tidak boleh membenci suaminya, kerana jika ia tidak kerana jika ia tidak menyukai salah satu karakteristiknya, ia boleh jadi menyukai sifatnya

yang lain. Secara baiknya seorang isteri haruslah menghormati keluarga sebelah suami kerana itu adalah keluarga bagi si isteri juga. Hormati sebagaimana si isteri menghormati keluarga sendiri. Sebagai seorang isteri yang baik hendaklah melayani suami dengan baik. Apabila si suami mengajak isteri untuk senggama, maka si isteri harus menunaikan hasrat si suami. Isteri yang baik akan menunaikan permintaan suami dan mengikuti segala kehendak suami sebagai ketua keluarga dan seharusnya bagi seorang isteri apabila berpoligami hendaklah mengikuti dan hormat akan suami supaya wujudnya toleransi.

C. Bentuk-Bentuk ketidakadilan Dalam Poligami.

Didalam rumahtangga yang berpoligami pasti akan berlakunya konflik yang tidak di ingini oleh para suami isteri. Berikut adalah bentuk-bentuk ketiadakadilan dalam poligami di dalam rumah tangga.¹⁹

1. Tidak adil dalam pemberian nafkah .

Jika seorang suami telah berpoligami kemudian tidak adil dalam pemberian hak nafkah. Maka pembagian giliran antara isteri yang satu dengan yang lainnya tidak sama dan ini tidak adil, ini adalah konflik yang relevan dan selalu terjadi kepada mereka yang berpoligami.

Bagi seorang suami yang sudah berpoligami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada isteri-isteri secara adil, terutama dalam hal nafkah dan giliran. Sehingga dalam pengaturannya dapat disesuaikan dengan hasil ishlahnya dengan salah satu isteri atau dengan beberapa orang isteri tersebut. Karena istilah itu merupakan solusi (jalan keluar) yang terbaik dalam menghadapi ataupun

¹⁹ Abdullah bin Taslim Al-Buthoni ,*Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*,(Jakarta:Rumah Ilmu,2008).h.12.

mengatasi problem rumah tangga. Suami dan isteri-isteri harus bergaul dengan baik, harus menunjukkan kesungguhan dalam kewajibannya, tidak boleh menunjukkan kebencian atau juga kurang memenuhi kewajiban sesuai dengan kemampuannya.

2. Menganiaya isterinya sedangkan isteri yang lain berbuat baik.

Sebagai kepala rumah tangga suami dituntut dapat dijadikan pelindung kepada isteri dan juga anak bukan sebagai penguasa dirumah yang suka memilih kasih terutama ketika dalam berpoligami. Demikian hal seperti itu di dalam kes penganiayaan isteri , suami yang melakukan penganiayaan tersebut sama ada sengaja menganiaya atau menipu harta isteri adalah melakukan suatu kesalahan .Bentuk seperti ini banyak terjadi di dalam berpoligami suami menganiyai isteri pertama sedangkan isteri yang lain dilayan dengan begitu baik. Seorang suami yang baik mestilah bersikap baik dan adil kepada isteri-isterinya agar dapat mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga.

3. Tidak bertolak ansur dengan isteri.

Seorang suami tidak cuba bertolak ansur kepada isteri isterinya, hanya mementingkan diri sendiri . Perbalahan antara suami isteri merupakan antara asam garam dalam rumah tangga yang pasti akan berlaku kerana kehidupan berumahtangga merupakan perkongsian antara dua insan yang pastinya mempunyai fahaman yang berbeza. Namun dengan cara hanya bertolak ansur dan saling memahami adalah perkara yang perlu untuk menjadikan sesebuah rumah tangga itu berkekalan. Apabila terjadinya perbalahan dalam sesebuah rumah

tangga antara suami dan isteri itu, hendaklah bertolak ansur dengan cara yang baik.

BAB III

MAHKAMAH SYARIAH BENTONG, PAHANG.

A. Latar Belakang, Sejarah Mahkamah Syariah.

Pada tahun 1948, sketetapan Mahkamah Persekutuan dan sistem kehakiman persekutuan memisahkan Mahkamah Syariah dari *hirarki* Mahkamah. Pada masa pemerintahan kuasa asing, segala urusan agama diberi kuasa kepada raja-raja Melayu tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti pernikahan, adat istiadat, dan agama. Pada tahun 1952, Negeri Pahang Darul Makmur yang telah mewujudkan Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syarak, kemudian diikuti oleh Negeri-negeri lain di Malaysia Barat. Mahkamah ini beralamat di Jalan Bentong, Mahkamah Syariah Bentong, Pahang Darul Makmur.

Meskipun undang-undang ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tidak banyak perubahan yang bermakna. Undang-undang ini terus menerus dipakai sampai kemudian terjadi perubahan yang digunakan pada awal tahun 80-an dan berlanjutan hingga sampai dengan tahun 90-an. Sultan merupakan Ketua Perlembagaan Negeri di Negeri Bagian masing-masing di atas Menteri Besar (Gubernur). Di bawah Perlembagaan Negeri, kuasa perundangan dipunyai oleh Dewan Undangan yang melantik ahli Dewan untuk membentuk Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO/Anggota) kabinet.²⁰

Pejabat Agama menjalankan *pentadbiran* (Wewenang) dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan Zakat, Baitulmal, Dakwah, pendidikan, pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri

²⁰ Buku Undang-Undang Negeri Pahang, Malaysia: Terbitan PNMB, Malaysia, 2005. hal 44.

tersebut di Malaysia. Pada masa kini semua Mahkamah Syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitاسnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Dari segi pentadbiran pula, Mahkamah Syariah masih di letakkan di bawah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP), namun kerajaan negeri dengan persetujuan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dan perkenan KDYMM Sultan Pahang atas nasihat dan pandangan daripada Jawatankuasa Syariah/Sivil telah bersetuju supaya pentadbiran Mahkamah Syariah dipisahkan terus daripada pentadbiran Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP).

Beberapa pemerintah telah di wujudkan dan di luluskan oleh Kerajaan Negeri bagi maksud pengesahan organisasi baru Mahkamah Syariah Pahang. Di antaranya ialah Ketua Hakim Syari'ah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Pendaftar, Pembantu Pendaftar dan beberapa dari segi *pentadbiran*. Maka dengan rasminya telah terpisah daripada pentadbiran Jabatan Agama Islam Pahang dan terbentuklah satu organisasi di Mahkamah Syariah Negeri Pahang dan seterusnya bermulalah sejarah baru bagi Kerajaan Negeri Pahang.

Secara rasminya, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang telah ditubuhkan pada 19 Januari 1995 yang sebelum itu lebih dikenali sebagai Mahkamah kadi di Jabatan Agama Islam Pahang. Dengan penubuhan tersebut, ianya terpisah dari *pentadbiran* Jabatan Agama Islam Pahang dan mempunyai struktur organisasinya sendiri. Beribu pejabat di Kuantan, Pahang. Pada ketika itu lebih dikenali sebagai

Mahkamah Syariah Pahang dan pada tahun 2005 telah ditukarkan nama kepada Jabatan Kehakiman Syariah Pahang.

Penubuhan Mahkamah Syariah diperuntukan di bawah Seksyen 42 Enakmen *Pentadbiran* Undang-Undang Islam pada No. 3 Tahun 1991. Jabatan Kehakiman Syariah diletakkan di bawah *pentadbiran* Setia usaha Kerajaan Negeri Pahang (SUK) dan diketuai oleh Yang Amat Arif (Y.A.A.) Ketua Hakim Syari'i. Beliau juga dilantik sebagai Pengurus Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Di bawah pengawalannya terdapat dua orang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, seorang Ketua Pendaftar, tujuh orang Hakim Mahkamah Rendah Syariah serta beberapa kakitangan sokongan. Bagi melicinkan proses dan kemudahan kepada orang ramai, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang mempunyai Mahkamah Rendah Syariah hampir di semua daerah dalam Negeri Pahang.

Terdapat 13 buah Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Pahang iaitu di Kuantan, Maran, Pekan, Muadzam Shah, Rompin, Temerloh, Bera, (masih belum beroperasi) Chenor, Bentong, Cameron Highlands, Jerantut, Kuala Lipis dan Raub. Manakala hanya terdapat 2 Mahkamah Tinggi Syariah yaitu Di Kuantan (dikenali sebagai Mahkamah Tinggi Syariah Pahang) dan di Bentong (Di kenali sebagai Mahkamah Tinggi Syariah Bentong).

Mahkamah Tinggi Syariah Pahang akan menjalankan Perbicaraan bagi permasalahan Mahkamah Tinggi di sekitar Daerah Kuantan, Pekan, Rompin, Maran, Muadzam Shah, Chenor dan Bera. Manakala Mahkamah Tinggi Syariah Bentong akan menjalankan pembicaraan bagi permasalahan di Daerah Bentong, Temerloh, Jerantut, Kuala Lipis, Raub dan Cameron Highlands. Jabatan

Kehakiman Syariah Pahang turut mempunyai satu Mahkamah Rayuan yang akan menjalankan pembicaraan terhadap permasalahan Rayuan di seluruh Negeri Pahang.

Kesimpulannya, penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang adalah penting kerana ia merupakan tempat rujukan untuk menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah, penceraian, fasakh, judi, minum arak , khalwat dan sebagainya. Ia juga berfungsi untuk menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan perundangan Islam mengikut Hukum Syara' secara adil, dan berkesan.

Daripada itu, hirarki Mahkamah telah bertukar menjadi Mahkamah Kadi kepada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Kadi Besar kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan Jawatan kuasa Ulang bicara kepada Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Syariah Bentong juga terdapat seorang hakim, dua orang di Jabatan Unit Pentadbiran Mahkamah, dua orang pegawai di Unit Pentadbiran dan kewangan, seorang pembantu syariah ,seorang pembantu tadbir kewangan dan seorang panitera.

B. Visi dan Misi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Bentong , Pahang.

Adapun Misi di Jabatan Kehakiman Syariah Bentong Pahang adalah Mendengar kes mal, jenayah dan faraid dalam kewenangan, juga melaksanakan pengadilan,pengurusan Mahkamah Syariah dan perkhidmatan dukungan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan ketetapan Undang-Undang Islam

yang seragam untuk mencapai keredhaan Allah. Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah:

Menjadikan Mahkamah Syariah Bentong Pahang sebagai sebuah agensi yang berwibawa dalam melaksanakan perundangan Islam demi menegakkan keadilan.

Adapun objektif Mahkamah Syariah Bentong adalah:

1. Menyegerakan pengendalian kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan berkesan.
2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kaki tangan dari aspek perundangan dan pengurusan.
3. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat media dalam pentadbiran.
4. Melaksanakan Sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan Hukum Syara' dan Undang-Undang Negara yang ditetapkan.
5. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan fasilitas yang terbaik dan mencukupi.

Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah adalah:

1. Menguruskan permohonan pendaftaran kasus-kasus syariah yang seperti permasalahan Maal, Jinayah dan Faraid.
2. Menguruskan perbicaraan sidang kasus syariah yaitu kasus Mal Jenayah dan Faraid.
3. Menerima mendengar dan memutuskan kasus-kasus rayuan syariah maal dan jenayah secara teratur dan berkesan.

4. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan pembagian harta atau faraidh.
5. Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.

Begitu juga dengan tujuan dan peranan Jabatan Kehakiman adalah:

1. Mengekalkan perundangan Islam yang ditetapkan kepada Mahkamah ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah s.w.t berdasarkan al-Quran dan As-Sunnah.
2. Menjalankan Administrasi agama Islam al-Quran dan As-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan bagi orang Islam.
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan keluarga dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasihat serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberi bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin berumahtangga agar dapat membina bersama rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat membuat pengaduan kepada pihak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah, penceraian, talak, fasakh, dan sebagainya.

9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain perkara mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal yang berkaitan seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan.
12. Badan yang telah dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.

C. Fungsi Pengadilan Di Mahkamah Syariah Bentong.

Cara pelaksanaan di Mahkamah Syariah ada tiga cara, antaranya adalah Mahkamah Rendah Syariah pelaksanaannya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang ditetapkan oleh Enakmen Negeri.
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan Mahkamah
4. Membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah. Selain daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga mempunyai cara pelaksanaannya tersendiri, antaranya adalah:
 1. Membicarakan kasus-kasus yang ditetapkan kepadanya
 2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus sivil dan jenayah
 3. Menyelesaikan dan mengesahkan kasus-kasus faraid
 4. Menguruskan kasus-kasus rayuan

5. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (bagi sesetengah Negeri)

Yang ketiga adalah Mahkamah Rayuan Syariah dengan pelaksanaannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan.
2. Mempunyai kuasa pembatalan setiap tuntutan oleh Mahkamah Syariah.

D. Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah

Secara umumnya Mahkamah Syariah sesuatu Negeri di Malaysia adalah berwenang hanya di dalam negeri tersebut sahaja. Ini adalah kerana dasar pendirian Mahkamah Syariah adalah di dalam wewenang Negeri dan hal tersebut terbatas kepada undang-undang diri orang-orang Islam sahaja. Hal ini jelas diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Senarai 2 Butiran 1. Bagi Wilayah Persekutuan juga, berdirinya Mahkamah Syariah adalah seiring dengan penubuhan Wilayah Persekutuan bertarikh pada 1.2.1974 melalui Enakmen maka Mahkamah Syariah berkuasa juga didirikan mengikut kehendak akta tersebut. Dalam Seksyen 40(1) akta tersebut, telah ditetapkan bahawa Yang Di-Pertuan Agong boleh menasihati kepada Menteri, melalui pemberitahuan dalam penetapan mendirikan Mahkamah-Mahkamah Rendah Syariah juga bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan di tempat-tempat yang difikirkan.

Dalam Seksyen 40(2) akta yang sama pula, ditetapkan bahawa Yang Di-Pertuan Agong boleh berkuasa atas menasihati Menteri, melalui pemberitahuan dalam penetapan mendirikan Mahkamah Tinggi Syariah bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan. Adapun dalam Seksyen 40(3) pula, diperuntukkan bahawa Yang Di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Menteri, melalui pemberitahuan dalam penetapan mendirikan suatu Mahkamah Rayuan Syariah bagi Negeri

Pahang. Prosedur kasus di dalam Mahkamah Syariah Bentong, Pahang. Aktivitas yang utama Mahkamah Syariah Bentong, Pahang adalah mendengar, membicarakan, dan memutuskan kasus-kasus yang telah didaftarkan. Aktivitas tersebut telah terbagi kepada tiga peringkat kasus, yaitu :

1. Kasus Mal (Kasus Tentang Kekeluargaan : Pernikahan, Pendaftaran Pernikahan, Dll).

a) Pendaftaran Kasus.

- Urusan pendaftaran kasus boleh dijalankan serta merta.

b) Proses sebutan pertama.

- waktu pengaduan pertama dalam waktu 21 hari setelah pendaftaran kasus.

c) Keputusan perbicaraan akan dikeluarkan dalam jangka waktu 2 minggu setelah selesai proses perbicaraan.

2. Kasus Jenayah.

a) Pendaftaran kes.

- Tindakan serta merta setelah kertas pertuduhan diserahkan oleh pendakwa syarie Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan.

b) Proses panggilan dan perbicaraan.

- Akan dipanggil dalam jangka waktu 21 hari.

c) Duit jaminan (Deposit).

- Akan dikembalikan dalam jangka waktu sebulan.

3. Kasus Faraidh (Kasus Tentang Pembagian Harta Warisan Dan Wasiat).

a) Pendaftaran permohonan.

- Dijalankan serta merta.

b) Keputusan permohonan

Perintah pembagian dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas selesai pembagian Istilah ‘*mal*’ sebenarnya merujuk kepada harta tetapi dalam konteks perundangan di Malaysia, ia merujuk kepada kasus-kasus bukan jenayah. Bidang mal bagi Mahkamah Syariah terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal (pemastautin) di negeri-negeri di Malaysia dan sebenarnya, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa mal yang hampir menyeluruh dan merangkumi banyak aspek kekeluargaan Islam termasuklah urusan-urusan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan isu-isu sebelum perkawinan.
2. Berkaitan dengan persoalan yang timbul semasa perkawinan.
3. Berkaitan dengan persoalan pembubaran perkawinan.
4. Isu-isu yang timbul/berbangkit selepas perceraian.
5. Permohonan penguatkuasaan perintah mahkamah.
6. Sebarang permohonan di dalam sesuatu kasus sedang berjalan (*interlocutory order*).
7. Permohonan-permohonan mengenai wasiat, wakaf dan harta pusaka.

CARTA ORGANISASI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG, PAHANG.

HAKIM MAHKAMAH SYARIAH

TUAN HAJI AMINUDDIN BIN AWANG DERANG

UNIT PENTADBIRAN MAHKAMAH

PENOLONG PEGAWAI SYARIAH
(L5 27 J)(1)
(HAIRUL FITRI BIN HAMZAH)

**UNIT PENTADBIRAN DAN
KEWANGAN**

PEMBANTU TADBIR
PERKERANIAN OPERASI(N 17
) (1)

(BUSU FIRDAUS BIN ABU BAKAR)

(L5 27)(1)

PEMBANTU SYARIAH

**PEMBANTU TADBIR
KEWANGAN**

(W 17)(1)
(TENGGU BALQIS BINTI)

PANITERA

(N 3)(1)
(ADZMI BIN ABDUL RAZAK)

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI MAHKAMAH SYARIAH BENTONG
TENTANG KETIDAKADILAN PELAKU POLIGAMI.

A. Putusan Hakim Kes Mal 0430-076-0217 Tahun 2012.

BORANG MS 2

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH

2002

(SYEKSYEN 8(a))

SAMAN

DI DALAM MAHKAMAH SYARIAH BENTONG

DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA

KES MAL NO04300-076-0217 TAHUN 2012

ANTARA

PLAINTIF

DEFENDEN

ROSLIANA BINTI KHALID

FAIZ BIN MUSA

(NO K/P:(650310-08-5969)

(NO K/P:740130 -20-5706)

PERNYATAAN TUNTUTAN

1. Plaintif dalam tindakan ini adalah isteri Defendan yang sah yang beralamat di No 165 ,taman murni 28700 Bentong ,Pahang.
2. Defendan pula adalah suami yang sah kepada Plaintif yang beralamat di ,No 34 rumah murah Karak,28600 karak ,Bentong Pahang.
3. Plaintif dan Defendan telah berkahwin secara sah di Bentong,Pahang Darul Makmur Pada 12.1.1992 dan telah didaftarkan sebagaimana pendaftaran no .12089.
4. Sesalinan surat perakuan nikah beserta kad pengenalan Plaintif dan Defendan dilampirkan dan ditandakan secara kolektif sebagai “Lampiran A”.
5. Hasil perkongsian hidup diantara Plaintif dan Defendan ,mereka telah dikurniakan DUA anak iaitu:-

BIL	NAMA ANAK	UMUR
1.	FITRI AFIQ BIN FAIZ (941031-06-5611)	18 TAHUN
2.	FIQRI ARKID BIN FAIZ (950430-06-5429)	17 TAHUN

Salinan-salinan kad pengenalan dan sijil kelahiran anak dilampirkan dan ditandakan secara kolektif sebagai “Lampiran B”.

6. Plaintif telah menyatakan Defendan telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab beliau seorang suami dan bapa yang sepatutnya menjadi ketua keluarga dan membimbing keluarga.
7. Sebagai ketua keluarga ,Defendan cuai dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga Ayah .Ini kerana ,segala perbelanjaan rumah dan keperluan anak-anak kebanyakannya ditanggung oleh plaintif sendiri semenjak dari awal perkahwinan.
8. Defendan juga tidak mempunyai akhlak yang baik untuk dicontohi Plaintif dan terutamanya anak-anak.ini kerana Defendan cuai dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim Dalam melakukan kewajipan pada diri sendiri baik dari segi solat mahupun puasa wajib.
9. Defendan juga sering melakukan ketidakadilan dalam berpoligami.Defendan juga tidak adil dalam pengurusan dalam pemberian hak nafkah, isteri pertama iaitu plaintif hanya diberi nafkah sebanyak RM 400.00 sebulan manakala isteri kedua mendapat nafkah RM 2000.00.
10. Plaintif seterusnya menyatakan defendan merupakan seorang yang tidak berkemampuan untuk berpoligami memandangkan jumlah gaji Defendan adalah kurang untuk menampung perbelanjaan dua buah keluarga.
11. Plaintif telah serik dengan sikap Defendan yang tidak berubah dan adalah mustahil untuk plaintif hidup bersama dengan Defendan dan kerana keadaan sedemikian,plaintif perlu untuk membuat permohonan penceraian ini

12. Sepanjang tempoh perkahwinan ,plaintif adalah seorang isteri yang setia pada Defendan dan Plaintiff tidak pernah disabitkan oleh mana-mana Mahkamah yang mulia ini untuk suatu perintah seperti berikut:-

- a) Perintah penceraian /Pembubaran perkahwinannya dengan Defendan secara fasakh menurut peruntukan di bawah Seksyen 52 (e) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam 1987;
- b) Defendan diperintahkan membayar nafkah eddah sebanyak RM 3000.00 selama tempoh eddah;
- c) Lain –lain perintah yang difikirkan patut dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.Kepada Faiz bin Musa (no .k/p:650310-08-5969)

B. ANALISIS PUTUSAN PENULIS.

Terlebih dahulu penulis ingin memastikan sama ada Mahkamah ini dibidanguasa untuk mendengarkan memutuskan kes ini.Penggugat semasa permohonan ini tertera adalah seorang penduduk di Negeri Pahang iaitu beralamat Di NO 165 Taman Murni ,28700 Bentong ,Pahang berdasarkan kartu tanda penduduk pengugat.Oleh yang sedemikian,Mahkamah memutuskan tuntutan pengugat adalah dibidanguasa Mahkamah Syariah Negeri Pahang berdasarkan seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005;

“kecuali sebagaimana dengan nyata diperuntukkan selainnya,Enakmen ini hendaklah dipakai bagi semua orang yang beragama islam yang bermukim dalam

negeri ini dan bagi semua orang yang beragama islam yang tinggal dalam Negeri ini tetapi bermukim di luar negeri ini.”

Mahkamah juga merujuk kepada seksyen 45 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005 yang memperuntukkan:

45.kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata . Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah penceraian atau perintah mengenai penceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali:

- a) Jika pernikahan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini ;atau*
- b) Jika pernikahan itu telah dilangsungkan mengikut hukum syarak dan;*
- c) Jika berpendudukan salah satu pihak kepada pernikahan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Pahang.*

Berdasarkan alasan-alasan pengugat ,Mahkamah berpendapat adalah jelas pengugat mempunyai alasan yang sah di bawah seksyen 53(1)EUUKI 2005 Kerana alasan yang diberikan oleh pengugat selaras dengan peruntukan -peruntukan tersebut.

Berdasarkan keterangan dan hujah Pengugat ,Penulis terdapat tiga alasan fasakh pengugat iaitu:-

- a)Lalai dalam pemberian hak nafkah kepada pengugat dan anak-anak.

- b) Tidak adil dalam poligami
- c) Tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami.

a) Lalai Dalam Pemberian Hak Nafkah Kepada Pengugat dan Anak-Anak

Dakwaan pengugat seterusnya di petikan Nomor 7 dan 10 adalah tergugat lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan berjumlah RM500.00 manakala isteri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM1500.00. Berdasarkan takrif itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam kasus ini dalam isu tidak adil pemberian hak nafkah ini. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah ini kerana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di Surah An nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.²¹

²¹ Doi Abdurrahman, *Poligami dalam syariah*. Malaysia: terbitan Telaga Biru ,1992.h.23.

Ayat ini membicarakan seorang suami hendaklah menunaikan kewajiban dalam menunaikan nafkah kerana suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga itu dan wajar bagi suami dalam menunaikan hak pemberian nafkah ini sementara isteri sering kali memiliki berbagai hambatan jika dituntut untuk mencari nafkah seperti mengandung dan mengurus rumah tangga. Nafkah itu penting kepada keluarga dalam bentuk batin dan zahir.

b) Tidak Adil Dalam Poligami

Tergugat hanya membiarkan isu tersebut dalam tempoh masa yang lama tanpa memikirkan inisiatif untuk menyelesaikannya. Berdasarkan nombor 9 jelas menunjukkannya suami tidak adil dalam poligami. Sebagai suami yang berpoligami, terduga sepatutnya mencari jalan untuk mendamaikan penggugat dan madunya terduga sendiri menjalani hidup berpoligami yang sebenarnya, tetapi mahkamah berpandangan terduga hanya membiarkan perselisihan tersebut berterusan tanpa sebarang usaha yang wajar. Demikian juga firman Allah di dalam Al-Quran pada Surah An nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak). Perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perintah dari Allah pada ayat ini memerintahkan agar suami hendaklah berlaku adil dalam berpoligami dan larangan penganiayaan kepada isteri seterusnya berlaku adil kepada isteri yang dipoligami.

c. Tidak Bertanggungjawab Sebagai Seorang Suami.

Dakwaan di nomor 6 di penulis mendapati putusan hakim iaitu tergugat gagal bertanggungjawab sebagai suami. Sebagai seorang suami haruslah mempunyai sifat contoh yang baik kepada semua ahli keluarga tetapi tergugat mempunyai akhlak yang kurang baik seperti tidak mengikuti tuntutan agama. Sebagai seorang suami haruslah memiliki sikap tanggungjawab kepada keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Perintah dari Allah di dalam Al-Quran di dalam Surah At tahrir ayat 6 yang berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada

*Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*²²

Perintah dari Allah didalam ayat ini Mengatur tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan orang mukmin secara keseluruhan agar menjaga dirinya dan keluarganya . Seorang suami hendaklah menjaga keluarganya dengan baik dan ikhlas.

C. Putusan Hakim Kes Mal No 09700-013-6789.

BORANG MS 2

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH

2002

(SYEKSYEN 8(a))

SAMAN

DI DALAM MAHKAMAH SYARIAH BENTONG

DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA

KES MAL NO 09700-013-6789 TAHUN 2013

ANTARA

PLAINTIF

DAN

DEFENDEN

²²Abdullah bin Taslim Al-Buthoni, *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*, Jakarta: Terbitan Rumah Ilmu, 2010 h.16

ROSMA BINTI AZIDDIN
(NO K/P:800130-05-6706)

HAFIZ BIN SABRI
(NO K/P :740312-04-5769)

PERNYATAAN TUNTUTAN

1. Plaintif dalam tindakan ini adalah isteri defendan yang sah yang beralamat di No 200 ,taman muhibbah 28700 Bentong ,Pahang.
2. Defendan pula adalah suami yang sah kepada plaintif yang beralamat di ,No 34 taman desa Karak,28600 karak ,Bentong Pahang.
3. Plaintif dan Defendan telah berkahwin secara sah di Bentong,Pahang Darul Makmur Pada 10.10.1989 dan telah didaftarkan sebagaimana pendaftaran no .13029.
4. Sesalinan surat perakuan nikah beserta kad pengenalan plaintif dan defendan dilampirkan dan ditandakan secara kolektif sebagai “Lampiran A”.
5. Hasil perkongsian hidup diantara plaintif dan defendan ,mereka telah dikurniakan DUA anak iaitu:-

BIL	NAMA ANAK	UMUR
1	HARITH BIN HAFIZ (931021-06-5611)	19 TAHUN

(950430-06-5429)

Salinan-salinan kad pengenalan dan sijil kelahiran anak dilampirkan dan ditandakan secara kolektif sebagai ‘Lampiran B’.

6. Plaintif menyatakan Defendan juga telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab beliau layak seorang suami dan bapa yang sepatutnya menjadi ketua keluarga dan membimbing keluarga.
7. Sebagai ketua keluarga Defendan cuai dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga Ayah. Ini kerana ,segala perbelanjaan rumah dan keperluan anak-anak kebanyakannya ditanggung oleh plaintif sendiri semenjak dari awal perkahwinan. Defendan juga tidak mempunyai akhlak yang baik untuk dicontohi.
8. Plaintif dan terutamanya anak-anak ini kerana Defendan cuai dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim Dalam melakukan kewajipan pada diri sendiri baik dari segi solat mahupun puasa wajib.
9. Defendan juga sering melakukan ketidakadilan dalam berpoligami.
10. Defendan juga tidak adil dalam pengurusan dalam pemberian hak nafkah isteri pertama iaitu plaintif hanya diberi nafkah sebanyak RM 500.00

sebulan manakala isteri kedua mendapat nafkah RM 1500.00. Diketahui isteri kedua tidak mempunyai anak manakala Plaintiff mempunyai anak.

11. Plaintiff seterusnya menyatakan defendan merupakan seorang yang tidak berkemampuan untuk berpoligami memandangkan jumlah gaji Defendan adalah kurang untuk menampung perbelanjaan dua buah keluarga.
12. Plaintiff telah serik dengan sikap Defendan yang tidak berubah dan adalah mustahil untuk plaintiff hidup bersama dengan Defendan dan kerana keadaan sedemikian, plaintiff perlu untuk membuat permohonan penceraian ini.
13. Sepanjang tempoh perkahwinan ,plaintif adalah seorang isteri yang setia pada Defendan dan Plaintiff tidak pernah disabitkan oleh mana-mana Mahkamah yang mulia ini untuk suatu perintah seperti berikut:-
 - a) Perintah penceraian /Pembubaran perkahwinannya dengan Defendan secara fasakh menurut peruntukan di bawah Seksyen 52 (e) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam 1987;
 - b) Defendan juga diperintahkan membayar nafkah eddah sebanyak RM 3000.00 selama tempoh eddah.
 - c) Lain –lain perintah yang harus difikirkan patut dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini. Kepada Hafiz bin Sabri (no .k/p:740312-04-5769)

D. Analisis Putusan Penulis.

Terlebih dahulu ,penulis memastikan sama ada Mahkamah ini dibidangkuasa untuk mendengarkan memutuskan kasus ini.Penggugat semasa permohonan ini tertera adalah seorang penduduk di Negeri Pahang iaitu beralamat Di NO 34 Taman Desa Damai ,28700 Bentong ,Pahang berdasarkan kartu tanda penduduk pengugat.Oleh yang sedemikian,Mahkamah memutuskan tuntutan pengugat adalah dibidangkuasa Mahkamah Syariah Negeri Pahang berdasarkan seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005;

“kecuali sebagaimana dengan nyata diperuntukkan selainnya, Enakmen ini hendaklah dipakai bagi semua orang yang beragama islam yang menetap dalam negeri ini dan bagi semua orang yang beragama islam yang menetap dalam Negeri ini tetapi menetap di luar negeri ini.”

Mahkamah juga merujuk kepada seksyen 45 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005 yang memperuntukkan:

45. kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata. Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah penceraian atau perintah mengenai penceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali:

- a) Jika pernikahan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini ;atau*

- b) Jika pernikahan itu telah dilangsungkan mengikut hukum syarak dan;*
- c) Jika menetapi salah satu pihak kepada pernikahan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Pahang.*

Berdasarkan alasan-alasan oleh pengugat, penulis berpendapat adalah jelas pengugat mempunyai alasan yang sah di bawah seksyen 53 (1) EUUKI 2005 Karena alasan yang diberikan oleh pengugat selaras dengan peruntukan –peruntukan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Pengugat di Mahkamah, penulis mendapat tiga alasan fasakh pengugat yaitu:-

- a) Lalai dalam memberi hak nafkah kepada pengugat dan anak-anak.
- b) Tidak adil dalam poligami
- c) Tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami.

a) Lalai dalam Memberi Hak Nafkah Kepada Pengugat dan Anak-Anak.

Dakwaan pengugat di nomor 7 dan 10 seterusnya adalah tergugat gagal memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini karena pengugat mendapat nafkah perbulan bejumlah RM 500.00 manakala isteri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM 1500.00. Berdasarkan keputusan itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam permasalahan ini dalam isu tidak adil nafkah ini. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah karena di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di Surah An Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat ini membicarakan seorang suami hendaklah menunaikan kewajiban dalam menunaikan nafkah karena suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga itu dan wajar bagi suami dalam menunaikan hak pemberian nafkah ini sementara isteri sering kali memiliki berbagai hambatan jika dituntut untuk mencari nafkah seperti mengandung dan mengurus rumah tangga.

b) Tidak Adil Dalam Poligami

Tergugat hanya membiarkan isu tersebut berdasarkan nomor 9 di putusan hakim. Tergugat dalam tempoh masa yang lama tanpa memikirkan inisiatif untuk menyelesaikannya. sebagai suami yang berpoligami ,tergugat seharusnya mencari jalan untuk mendamaikan pengugat dan madunya tergugat sendiri menjalani hidup berpoligami yang sebenarnya, tetapi mahkamah berpandangan bahwa tergugat hanya membiarkan perselisihan tersebut berterusan tanpa solusi. Demikian juga firman Allah di dalam Al-Quran pada Surah An nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا

تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²³

Perintah dari Allah pada ayat ini memerintahkan agar suami hendaklah berlaku adil dalam berpoligami dan larangan penganiayaan kepada isteri seterusnya berlaku adil kepada isteri yang dipoligami. Oleh itu Mahkamah berpandangan bahawa tergugat telah gagal berlaku adil dalam poligami dan wujudnya shiqaq yang berterusan antara pengugat dan tergugat.

c. Tidak Bertanggungjawab Sebagai Seorang Suami.

²³ Rodli Makmun,. *Poligami Dalam Tafsir*, tahun ,Ponorogo :Terbitan dari Stain Ponorogo Press,2009.h 29

Tergugat merupakan suami yang kurang bertanggungjawab seperti dikatakan nomor 6, kepada semua ahli keluarga bahkan tergugat mempunyai akhlak yang kurang baik seperti tidak mengikuti tuntutan agama. Sebagai seorang suami haruslah memiliki sikap tanggungjawab kepada keluarga. Dalam kehidupan suami isteri ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal penting yang lazim dilakukan oleh suami isteri supaya agar dalam kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas-tugas tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai.

Perintah dari Allah di dalam Al-Quran di dalam Surah At tahirim ayat 6 yang berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman ! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Perintah dari Allah didalam ayat ini mengatur tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan orang mukmin secara keseluruhan agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Allah memerintahkan agar manusia mencegah dirinya dari perbuatan dosa, serta bertaubat dengan taubat nasuha. Secara jelasnya suami harus bertanggung jawab dalam menunaikan amanah sebagai seorang suami agar mewujudkan keluarga yang terlebih terarah.

Menjadikan rumah tangga terarah, teratur dan tercapai tujuan mulianya merupakan diantara tanggung jawab suami dan istri agar dapat menghasilkan keluarga yang baik serta keluarga yang bahagia. Sebagai seorang suami haruslah memiliki sikap tanggungjawab kepada keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.

d). Hakim di Mahkamah Perintah Untuk Membubarkan Pernikahan Untuk Fasakh.

Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, menikah mengikut hukum syarak adalah berhak untuk mendapat sesuatu perintah untuk membubarkan pernikahan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut iaitu:²⁴

²⁴ Ruzman Md Noor *Kesaksian Dalam Konteks Undang-Undang Syariah di Malaysia* (Kuala Lumpur,2007)hal.37.

- a) Bahwa tempat dimana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama kurun waktu lebih daripada satu tahun.
- b) Bahwa suami telah lalai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tiga bulan.
- c) Bahwa suami atau isteri telah dihukum penjara selama kurun waktu tiga tahun atau lebih.
- d) Bahwa suami atau isteri telah tidak menunaikan ,tanpa sebab yang munasabah, kewajiban pernikahannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.
- e) Bahwa suami telah mandul pada masa pernikahan dan isteri tidak tahu pada masa pernikahan bahawa suami mandul.
- f) Bahwa suami atau isteri telah gila selama dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau kelamin dalam keadaan boleh berjangkit kepada seseorang yang lain.
- g) Bahwa isteri, setelah dinikahkan oleh wali Mujbirnya sebelum ia mencapai umur lapan belas tahun dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu.
- h) Bahwa suami atau isteri menganiaya isteri atau suaminya yaitu, antara lain :
 - i. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.
 - ii. Berteman dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat atau keji mengikut pandangan hukum syarak .
 - iii. Coba memaksa isteri hidup secara tidak baik.

- iv. Menghabiskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu dari menggunakan hak-haknya disisi undang-undang terhadap harta itu.
- v. Menghalang isteri atau suami dari menunaikan atau menjalankan kewajiban atau amalan agamanya.
- vi. Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syarak.
- vii. Bahwa walau pun empat bulan berlalu tetapi isteri masih belum disetubuhi oleh karena suami bersengaja enggan menyetubuhinya
- viii. Bahwa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah ,sama ada oleh sebab paksaan, kesalahan ketidaksempurnaan akal ,atau hal keadaan lain yang diakui oleh hukum syara'.

E. Upaya Menciptakan Poligami Yang Adil Dan Harmonis.

Pria yang memiliki lebih dari satu isteri, dinamakan "Poligami." Namun, di Indonesia sendiri, belum banyak pria yang memberanikan berpoligami terkecuali mereka yang sudah mampu secara materi dan ruhaniah. Karena dua syarat yang wajib

di miliki oleh orang yang ingin berpoligami ini hukumnya wajib menurut syariat agama.

Banyak pria yang menganggap jika berpoligami akan membenturkan dua hati wanita, maka mereka tak berani melakukannya. Tetapi, jika dikira memang siap untuk berpoligami, maka hukumnya sah-sah saja. Seperti para orang yang mampu lahir dan batin.

Namun, tidak banyak wanita yang mau di jadikan istri lebih dari satu (madu), karena mereka menganggap, jika nanti cintanya akan terbagi dan tak bisa mencintai dengan tulus. Berikut ini akan memberikan cara berpoligami yang baik dan benar.²⁵

1. Adil.

Bersikap adil sudah tentu barang yang sulit dilakukan manusia biasa. Terkecuali jika kita sudah mampu dan jelas menunaikan kebenarannya, maka sah saja. Bersikap adil kepada banyak orang, lebih-lebih pada isteri adalah besar kemungkinan mampu suami melakukannya. Didalam poligami sikap adil sesama isteri sangat penting ini karena melibatkan beberapa pihak. Sikap tanggungjawab adil harus diambil kira agar memastikan keharmonisan rumah tangga berkekalan hingga akhir hayat.

2. Mampu dan kukuh dalam keuangan/Harta.

Hidup di dunia ini jika tanpa harta, tak akan bisa berkembang. Karena kita masih di dunia, belum di akhirat. Maka, jika kita termasuk orang yang sudah mampu

²⁵ Najla 'As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*,(Malaysia:Terbitan Pustaka Al-Inabah,2008).h 56.

secara financial, boleh melakukannya. Ketika saat berpoligami hendaklah mampu dalam memberi nafkah kepada para isteri dan anak dan suatu kezaliman jika berpoligami tetapi tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada para isteri.

3. Ikhlas dan Syukur.

Ikhlas dan syukur dalam menjalani kehidupan keluarga berpoligami adalah sudah sukar dan kurang banyak ditemukan. Jika kita sudah mampu ikhlas dan mensyukuri apapun yang ada di dalam keluarga, maka diperbolehkan. Karena sekali lagi, ikhlas dan syukur itu sangat sulit dilakukan, kecuali mereka yang betul betul ikhlas pada jalan Allah dalam percintaan sejati.

4. Bertolak ansur.

Bagaimana mampu menjalani rumah tangga berpoligami jika kita masih memiliki sifat egois. Segeralah membuang jauh-jauh sifat itu dengan belajar dan terus belajar. Keegoisan itulah yang bisa membuat kekecohan rumah tangga, apalagi jika anda hanya mementingkan salah satu isteri dibanding yang lain.

5. Carilah isteri yang siap dipoligami.

Jika kita sudah memiliki isteri yang siap dipoligami, sekarang waktunya mencari wanita yang ingin di poligami. Karena tak banyak wanita yang ingin dipoligami, karena mereka beranggapan jika dipoligami berarti diduakan. Maka, tugas kita adalah meyakinkannya agar ingin dan ikhlas menjalani rumah tangga bersama kita.

6.Saling Mengerti Antara Satu Sama Lain.²⁶

Sikap saling mengerti ini bisa didapatkan dari kedewasaan. Jika kita berpikiran dewasa, maka mengerti satu sama lain itu sudah tentu ada di dalam bagiannya. Lihat saja mereka yang kurang dewasa diri. Akhirnya tidak dapat menyelamatkan rumah tangga sebaliknya berlaku diskriminasi sesama kita.

7. Aktif Berkomunikasi.

Berkomunikasi adalah langkah paling penting dan berkesan di dalam keluarga berpoligami. Jangan biarkan komunikasi hanya sebatas percakapan saja dalam rumah tangga kita. Jika kita terlalu banyak bermain sosial media, sama saja komunikasi kita mati dengan pasangan.

8. Gunakan Waktu Bermesraan Bersama.

Selalu pergunakan waktu untuk bermesraan untuk pasangan. Waktu itu layaknya pedang, jika kita tak bisa pergunakan waktu itu, kita akan kehilangan waktu selama-lamanya. Mengajak para isteri juga bagi meluangkan masa bersama agar terjalin ukhuwah sesama mereka.

9. Nafkah Lahir dan Batin.

Jika pria, berikanlah pasangan kita nafkah lahir dan batin terus menerus. Jangan hanya memberi nafkah batin, tapi kita sama sekali tak memberinya nafkah dan batin. Sebab, hal ini banyak terjadi di kalangan remaja yang sudah menikah dan masih kurang dewasa sampai saat ini.

²⁶ Najla 'As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*,(Malaysia:Terbitan Pustaka Al-Inabah,2008).h 56.

10. Bimbing Anak Bersama-sama

Anak kita hidup dalam pengaruh keluarga. Jika keluarga baik, maka baik pula anak. Jadi, bimbinglah anak bersama pasangan agar di saat kita tua, si anak akan membalas budi orang tua dan mendo'akan kita jika sudah tiada. Bersama –sama dalam menghidupkan keluarga yang soleh dan sakinah.

11. Berdo'a dan Beriman Pada Tuhan

Hal yang tak boleh ketinggalan dalam membina keluarga yang harmonis adalah berdo'a dan beriman kepada Tuhan. Kita hidup atasnya dan mati atasnya pula. Jadikan keluarga yang beriman kepadanya agar hidup selalu dilindungi olehnya. Keluarga adalah salah satu institusi yang didalamnya menciptakan individu yang ideal. Hal ini sangat mempengaruhi cara orang tua mendidik dalam berdo'a. Apabila mengamalkan berdo'a pasti pertolongan itu akan diperolehi dari malapetaka yang bahaya dalam rumah tangga. Doa adalah salah satu kunci utama dalam sebuah usaha. Usaha tanpa doa sama halnya dengan kesombongan, sedangkan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Kedua perkara hal tersebut saling berdampingan dan sama kuatnya untuk di perjuangkan demi tercapainya sesuatu yang diharapkan dan diimpikan di dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga yang baik dan harmoni.

BAB V

A. Kesimpulan

Uraian yang telah penulis paparkan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir daribagian penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis dan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dilihat dari bentuk-bentuk ketidakadilan pelaku dalam poligami sebagai alasan perceraian rumah tangga di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang antaranya lalai dalam memberi hak nafkah kepada isteri dan anak anak bahkan juga tidak adil dalam pembahagian memberi nafkah kepada isteri sedangkan di dalam islam itu apabila berpoligami suami mestilah adil dari berbagai sudut antaranya kasih sayang, hak penjagaan, hak tempat tinggal dan hak harta. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah untuk keperluan keluarga tambahan lagi berpoligami. Bentuk kedua dapat kita lihat dengan cara menganiaya pihak isteri . Sebagai ketua keluarga suami dituntut dalam penjagaan dapat dijadikan pelindung bagi isteri dan juga anak bukan menjadi penguasa dirumah yang suka memilih kasih terutama sekali ketika berpoligami. Bentuk ketiga dapat kita lihat, tidak bertolak ansur dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Ketika di dalam berpoligami hendaklah bertolak ansur dalam menghadapi segala bentuk ujian yang terjadi, namun dengan hanya bertolak ansur dapat menjadikan sebuah keluarga yang harmoni dan berkekalan. Suami juga haruslah bertanggung jawab dalam

dalam mengatur kehidupan berumah tangga agar menjadikan rumah tangga yang baik dan harmonis bersama isteri yang dipoligami dan anak.

2. Poligami di Mahkamah Syariah Bentong mengikut panduan dalam konteks perundangan Islam di Malaysia , perkara yang berhubung dengan poligami mestilah dilihat dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri-Negeri. Sekelipun Islam membenarkan poligami namun setiap lelaki Islam yang ingin berpoligami di Malaysia tertakluk kepada Enakmen yang telah ditetapkan oleh Mahkamah syariah Bentong. Syarat-syarat yang dinyatakan di bawah subseksyen 23(4) adalah bagi memastikan isteri-isteri mendapat keadilan supaya hak mereka terpelihara dan dilindungi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, pertama, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan; kedua, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.
3. Cara untuk menciptakan cara poligami yang adil adalah bersikap adil sudah tentu perkara yang sulit dilakukan manusia biasa. Terkecuali jika kita sudah mampu dan jelas menunaikan kebenarannya, maka sah saja. Bersikap adil kepada banyak orang, lebih-lebih pada isteri adalah besar kemungkinan mampu suami melakukannya. Didalam poligami sikap adil sesama isteri sangat penting ini kerana melibatkan beberapa pihak. Juga, Sikap saling mengerti ini bisa didapatkan dari kedewasaan. Jika kita berpikiran dewasa, maka mengerti satu sama lain itu sudah tentu ada di dalam bagiannya.

B. Saran-saran

Sebagai catatan akhir maka penulis akan memberikan saran:

1. Aturan tentang poligami di Malaysia atau dalam hal ini aturan perkawinan ke depan diharapkan bisa menampung semua aspirasi berbagai pihak terutama pihak perempuan.
2. Masalah denda atau hukuman bagi pelanggar aturan poligami perlu ditinjau kembali, selama ini denda atau hukuman bagi pelaku poligami yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku terlalu kecil. Sedangkan kalau kita perhatikan praktik poligami banyak sisi negatifnya, karena poligami sering menimbulkan masalah dalam keluarga, selain itu sebagai negara hukum kepastian hukum harus ada dan pelaksanaan hukum harus benar-benar ditegakkan dan hukum bukan hanya sebagai hiasan belaka.
3. Penyertaan persetujuan anak yang telah dewasa bagi pelaku poligami karena poligami akan berimbas pada isteri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Doi, *Poligami dalam syariah*. (Malaysia: terbitan Telaga Biru Malaysia,1992).
- Abu Izzat Al-Hafiz, *Fiqh Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur;cetakan Al-Hidayah,2004).
- An-Nadry Syaikh Muhammad Uwais, *Tafsir Ibnu Qayim*, (Damarkus: Terbitan Darul Falah, 2008).
- Al-Buthoni Abdullah bin Taslim, *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*, (Jakarta: Terbitan Rumah Ilmu, 2010).
- Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta:Terbitan Kencana, 2004).
- Bella Daura,*The Limits of Poligami in Islam dalam Journal of Islamic and Comparatif Law*, (Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969).
- Farat Karam Hilmi, *Poligami Pandangan Islam*, (Jakarta: Terbitan Darul Haq, 2011).
- Jamaluddin, *Hukum Perkahwinan 4 Mazhab*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara, 2012).
- Lubis Amany, *Kamus Modern Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2013).
- Madya Mahmood Zuhdi, Abdul Majid, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Cetakan Fakultas Syariah, Akademi Islam Malaysia, 1989).
- Makmun Rodli, *Poligami Dalam Tafsir*, (Ponorogo: Terbitan dari Stain Ponorogo Press, 2009).
- Md Noor Ruzman, *Kesaksian Dalam Konteks Undang-Undang Syariah di Malaysia*, (Kuala Lumpur, 2006).

Muhsin Firanda Abu Abdil, *Buku Mukjizat Poligami*. (Penerbit Nashirus sunnah, 2009).

Najla 'As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*, (Malaysia: Pustaka Al-Inabah, 2008).

Othman Abrak, *Kamus Komprehensif Bahasa Melayu*, (Malaysia: Terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd, 2003).

Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Terbitan Pustaka Al-Husna, 2003).

Sunarto, Achmad, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah*, (Surabaya: Terbitan Ampel Surabaya, 2014).

S.Pradja Juhaya, *Perkahwinan Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

Undang-Undang Negeri Pahang, PNMB, Malaysia, 2005.

Wardoyo Puspo, *Buku Poligami Siapa Takut*, (Jakarta: Terbitan Qultum Media, 2002).

LAMPIRAN.

BORANG MS 2

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH

2002
(SYEKSYEN 8(a))

SAMAN

**DI DALAM MAHKAMAH SYARIAH BENTONG
DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA**

KES MAL NO 04300-076-0217 TAHUN 2012

ANTARA

ROSLIANA BINTI KHALID
(NO k/p:740130-02-5706)

PLAINTIF

DAN

FAIZ BIN MUSA
(NO K/P:(650310-08-5969)

DEFENDAN

PERNYATAAN TUNTUTAN

13. Plaintiff dalam tindakan ini adalah isteri defendan yang sah yang beralamat di No 165 ,taman murni 28700 Bentong ,Pahang.
14. Defendan pula adalah suami yang sah kepada plaintiff yang beralamt di ,No 34 rumah murah Karak,28600 karak ,Bentong Pahang.
15. Plaintiff dan Defendan telah berkahwin secara sah di Bentong,Pahang Darul Makmur Pada 12.1.1992 dan telah didaftarkan sebagaimana pendaftaran no .12089.Sesalinan surat perakuan nikah beserta kad pengenalan plaintiff dan defendan dilampirkan dan ditandakan secara kolektif sebagai "Lampiran A".
16. Hasil perkongsian hidup diantara plaintiff dan defendan ,mereka telah dikurniakan DUA anak iaitu:-

BIL	NAMA ANAK	UMUR
1.	FITRI AFIQ BIN FAIZ (941031-06-5611)	18 TAHUN
2.	FIQRI ARKID BIN FAIZ (950430-06-5429)	17 TAHUN

Salinan-salinan kad pengenalan dan sijil kelahiran anak dilampirkan dan ditandakan secara kolektif sebagai "Lampiran B".

17. Plaintif menyatakan Defendan telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab beliau seorang suami dan bapa yang sepatutnya menjadi ketua keluarga dan membimbing keluarga.
18. Sebagai ketua keluarga ,Defendan cuai dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga Ayah .Ini kerana ,segala perbelanjaan rumah dan keperluan anak-anak kebanyakannya ditanggung oleh plaintif sendiri semenjak dari awal perkahwinan.
19. Defendan juga tidak mempunyai akhlak yang baik untuk dicontohi Plaintif dan terutamanya anak-anak.ini kerana Defendan cuai dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim Dalam melakukan kewajipan pada diri sendiri baik dari segi solat mahupun puasa wajib.
20. Defendan juga sering melakukan ketidakadilan dalam berpoligami.
21. Defendan juga tidak adil dalam pengurusan dalam pemberian hak nafkah, isteri pertama iaitu plaintif hanya diberi nafkah sebanyak RM 400.00 sebulan manakala isteri kedua mendapat nafkah RM 2000.00.
22. Plaintif seterusnya menyatakan defendan merupakan seorang yang tidak berkemampuan untuk berpoligami memandangkan jumlah gaji Defendan adalah kurang untuk menampung perbelanjaan dua buah keluarga.
23. Plaintif telah serik dengan sikap Defendan yang tidak berubah dan adalah mustahil untuk plaintif hidup bersama dengan Defendan dan kerana keadaan sedemikian,plaintif perlu untuk membuat permohonan penceraian ini.

24. Sepanjang tempoh perkahwinan ,plaintif adalah seorang isteri yang setia pada Defendan Dan Plaintif tidak pernah disabitkan oleh mana-mana Mahkamah yang mulia ini untuk suatu perintah seperti berikut:-

- d) Perintah penceraian /Pembubaran perkahwinannya dengan Defendan secara fasakh menurut peruntukan di bawah Seksyen 52 (e) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam 1987;
- e) Defendan diperintahkan membayar nafkah eddah sebanyak RM 3000.00 selama tempoh eddah;
- f) Lain –lain perintah yang difikirkan patut dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.Kepada Faiz bin Musa (no .k/p:650310-08-5969)

Bertarikh pada 02 haribulan oktober 2012.